



RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya kami dapat menyusun dan menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Rencana Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini merupakan penjelasan secara ringkas mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD, dimana penjadwalan dilakukan sesuai siklus yang telah ditetapkan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah akan terus bekerja sesuai penjadwalan dan siklus yang telah ditetapkan.

Kami berharap Rencana Kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Natuna.

Ranai, 2022

Kepala Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Natuna,


HENDRA KUSUMA, SH, M.SI
NIP. 19750909200121006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	1
3. Maksud dan Tujuan	2
4. Visi dan Misi	2
BAB II TUGAS POKOK, FUNSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
2. Struktur Organisasi	5
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
BAB IV PENUTUP	16

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan / atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana kinerja menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja dalam setiap tahunnya. Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan untuk Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 mendukung visi misi Pemerintah Daerah, yang di dalamnya terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Permerintah Kabupaten Natuna, makam disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, yang diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Perumhan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022, disusun berdasarkan :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan Manajemen Kinerja SAKIP. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini bertujuan untuk :

1. Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kinerja tahun 2022;
2. Sebagai pedoman keselarasan antara target kinerja dan rencana kerja anggaran
3. Sebagai Pedoman dalam menyusun Perjanjian Kinerja.
4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah pada bidang perumahan dan akwasan permukiman.

4. VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kepala Daerah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Perangkat daerah tidak mempunyai Visi tersendiri karena Visi dari Kepala Daerah Kabupaten Natuna adalah "**Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kulturan**".

Sedangkan Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi local
- Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis
- Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur
- Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)
- Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan perumusan tujuan dan sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Natuna antara lain :

Misi	Tujuan	Sasaran
Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur	Mewujukan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh
		Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah

BAB II - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 62 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Serta Pertanahan serta mengkoordinasikan dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis lainnya.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

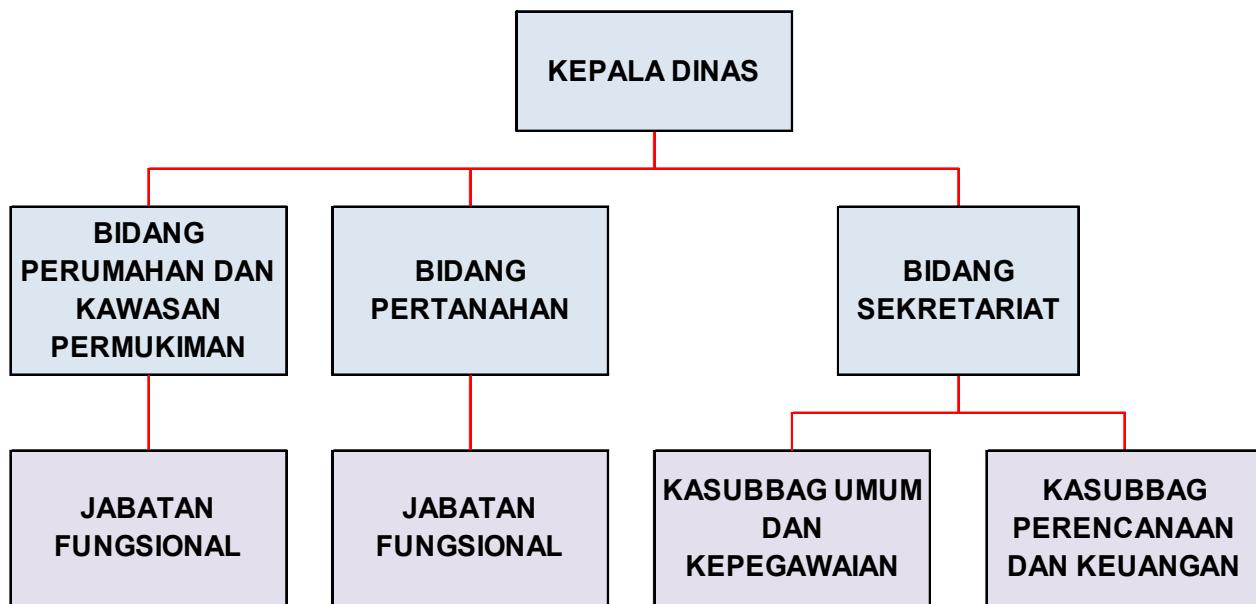
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibantu oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagai berikut :

1. Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Bidang Pertanahan

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna dibantu oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang. Struktur organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 1.3.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TIPE C



Sumber : Perbub No. 2 Tahun 2022

BAB III - RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam bab ini digambarkan tentang Rencana Kinerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022. Adapun Program / Kegiatan serta Pendanaan dimaksud adalah dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN : 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.1111.	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah ibadah	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Persen	52
4.1111.	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	Persentase Area Kawasan Kumuh Yang Tertangani	Paket	40
4.1111.	Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Yang Sesuai dengan RTRW	Persentase Luas Lahan Yang Dibersertifikat	M2	25
6.1111.	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	75,40
6.1121.	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah	Terciptanya Kinerja dan Kemampuan SDM	Persen	80

Ranai, 20 Desember 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Natuna



RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 : 2022

	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	90.600.000		
	Output	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Laporan	3		
	Outcome	Nilai Laporan LKjIP	Bulan	12		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	3.637.586.900		
	Output	Jumlah Pegawai	Orang	36		
	Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000		
	Output	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	Satker	1		
	Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000		
	Output	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	Orang	5		
	Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	133.250.000		
	Output	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	3		
	Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12		
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	250.000.000		
	Output	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	5		

	PROGRAM, KEGIATAN DANSUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Outcome	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jenis	10
		Outcome	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	47.600.000
		Output	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotak	150
		Outcome	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	40.000.000
		Output	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	Lembar	5.000
		Outcome	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	15.000.000
		Output	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buah	20
		Outcome	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyediaan Bahan/Material		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	45.000.000
		Output	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	Jenis	10
		Outcome	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	350.000.000
		Output	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	66
		Outcome	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang disusun	Dokumen	40
		Outcome	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	200.000.000

	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	m2	50
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	25.000.000
		Output	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	Lembar	2.500
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	600.000.000
		Output	Jumlah penyediaan tagihan internet, air dan listrik kantor	Tagihan	2
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	795.000.000
		Output	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	Orang	36
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	Unit	2
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	15.000.000
		Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	5
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Bulan	12
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)					
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30.000.000
		Output	Jumlah sertifikat	Lembar	2

	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
	Outcome	Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah	Bulan	12	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI					
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000	
	Output	Jumlah koordinasi izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	Koordinasi	2	
	Outcome	Persentase pengelolaan izin lokasi	Bulan	12	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	150.000.000	
	Output	Jumlah laporan	Dokumen	1	
	Outcome	Persentase Rumah Layak Huni	Bulan	12	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	300.000.000	
	Output	Jumlah laporan	Dokumen	1	
	Outcome	Persentase Rumah Layak Huni	Bulan	12	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	390.000.000	
	Output	Jumlah rumah yang dibangun	Unit	2	
	Outcome	Persentase Rumah Layak Huni	Bulan	12	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	380.000.000	
	Output	Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	2	
	Outcome	Persentase Rumah Layak Huni	Bulan	12	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000	
	Output	Jumlah rumah yang dibangun dan di rehab bagi korban bencana	Unit	2	
	Outcome	Persentase Rumah Layak Huni	Bulan	12	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
	Output	Jumlah Laporan	Dokumen	1
	Outcome	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Bulan	12
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	750.000.000
	Output	Jumlah rumah yang direhab	Unit	30
	Outcome	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Bulan	12
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	1.000.000.000
	Output	Luas area permukiman kumuh yang dibugar	Ha	1
	Outcome	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Bulan	12
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
	Output	Jumlah unit	Unit	5
	Outcome	persentase areal kawasan kumuh	Bulan	12
PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN				
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	150.000.000
	Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
	Outcome	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	Bulan	12
PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN				
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
	Output	Jumlah mediasi	Mediasi	4
	Outcome	persentase penyelesaian sengketa tanah	Bulan	12
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	719.842.630

	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Rumah terbangun	Unit	20
		Outcome	Rasio Rumah Layak Huni	Bulan	12
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	150.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
		Outcome	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Bulan	12
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
		Outcome	Persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	Bulan	12
	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat **)	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	175.000.000
		Output	Jumlah rumah tangga	Rumah Tangga	5
		Outcome	Persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	Bulan	12
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Luas Tanah yang dibebaskan	Ha	5
		Outcome	Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Bulan	12
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	9.500.000.000
		Output	Jumlah rumah ibadah yang dibangun dan dipelihara	Unit	5
		Outcome	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Bulan	12
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Inventarisasi Subjek dan Obyek Redistribusi Tanah	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1

	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Outcome	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Bulan	12
Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
		Outcome	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Bulan	12
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
		Outcome	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Bulan	12
Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	150.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
		Outcome	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Bulan	1
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong					
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	150.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
		Outcome	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	Bulan	12
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					
Pemanfaatan Tanah Kosong		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	150.000.000
		Output	Jumlah penerima manfaat	Orang	2
		Outcome	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	Bulan	12
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
Penerbitan Izin Membuka Tanah					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah rekomendasi	Rekomendasi	1

	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Outcome	persentase pengelolaan izin membuka tanah	Bulan	12
		Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
		Outcome	persentase pengelolaan izin membuka tanah	Bulan	12
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	700.000.000
		Output	Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah	Koordinasi	1
		Outcome	persentase luas tanah bersertifikat	Bulan	12
Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah laporan	Dokumen	1
		Outcome	persentase luas tanah bersertifikat	Bulan	12
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah peta zonatanah	Dokumen	1
		Outcome	persentase luas tanah bersertifikat	Bulan	12

Ranai, 20 Desember 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Natuna



BAB V – PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna Tahun 2022 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Di sini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran stratejik organisasi kepada para stakeholders. Penyusunan Rencana Kinerja juga merupakan salah satu penjabaran APBD dalam RKA yang sedemikian rinci yang membandingkan input untuk menghasilkan suatu output yang berorientasi hasil.

Keberhasilan pencapaian visi dan target kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2022 memerlukan kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna. Semoga dengan pelaksanaan rencana kinerja tahunan OPD dapat terwujud cita-cita Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural**”.